



WUJUDKAN PILKADA YOGYA TANPA PELANGGARAN

Tokoh Masyarakat Diajak Ikut Melakukan Pengawasan

YOGYA (KR) - Memasuki November dinamika Pilkada Kota Yogya diprediksi akan semakin meningkat hingga mendekati pemungutan suara. Para tokoh masyarakat pun diajak ikut serta melakukan pengawasan guna mewujudkan Pilkada Kota Yogya yang terbebas dari pelanggaran.

Koordinator Divisi Penanganan, Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Yogya Jantan Putra Bangsa, mengajak masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pilkada 2024. Terlebih saat ini sudah memasuki tahapan kampanye dan rentan berpotensi terjadinya pelanggaran atau kecurangan. "Perlu dicermati bahwa kegiatan kampanye itu tidak boleh dilakukan di tempat ibadah.

Acara-acara juga tidak boleh dilaksanakan di bangunan atau gedung yang terdaftar dalam aset Pemkot Yogya," ungkapnya, Jumat (1/11). Selain itu, dirinya juga menekankan potensi pelanggaran dalam pemilu yang perlu diwaspadai yakni praktik politik uang. Regulasi yang ada membatasi kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran terkait politik uang. Dalam UU 6/2020 disebutkan

setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang, materi lain, atau janji untuk mempengaruhi pemilih dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan itu lantas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2024. Dalam implementasi di lapangan Bawaslu sering kali menemui kendala karena ruang gerak terbatas dalam melakukan penindakan. Terutama jika tidak ada bukti yang cukup kuat, seperti saksi atau alat bukti yang meyakinkan.

"Makanya pada kondisi ini penindakan terhadap politik uang memerlukan dukungan dari masyarakat. Terutama untuk melaporkan sehingga proses pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil. Masyarakat

dapat melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada Bawaslu Kota Yogya dan Panwaslucam di 14 kementren se kota Yogya," ajaknya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya Wirawan Hario Yudo, mengaku Pemkot Yogya sudah memfasilitasi pertemuan bersama para tokoh masyarakat kaitannya dengan pengawasan Pilkada. Menurutnya pemilu adalah satu-satunya jalan demokrasi yang digelar dengan penuh kedamaian. "Pilkada pada 27 November 2024 nanti harus membawa nilai-nilai positif yang bisa ditularkan ke berbagai lembaga lainnya. Sudah selayaknya kita menggelar Pilkada dengan aman dan damai," ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan agar Kota Yogya dapat menjadi barometer bagi daerah lain dalam menunjukkan kedewasaan demokrasi. Ia meminta seluruh tokoh masyarakat untuk menjadi corong dalam memperkuat persatuan sosial dan menyebarkan nilai-nilai positif di tengah masyarakat. "Mari kita bangun demokrasi dengan tatanan yang baik agar Kota Yogya tetap adem ayem, tanpa perselisihan. Kedewasaan demokrasi perlu kita tunjukkan bersama," tambahnya.

Sementara Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Yogya Fatonis Siradja, menyampaikan apresiasi terhadap suasana kampanye Pilkada 2024 di Kota Yogya yang dinilai berjalan dengan aman

dan damai. Ia mengamati hingga saat ini proses kampanye di kota Yogya masih berada dalam koridor yang sesuai dan tidak menonjolkan politik identitas. Selain itu para pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogya juga memiliki latar belakang yang baik. Ini menurutnya dapat menjadi pilihan positif bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka ke depan. "Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan dan kedamaian selama proses demokrasi ini berlangsung. Kondisi adem ayem ini menjadi tanggung jawab bersama agar Yogyakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelenggarakan Pilkada yang aman dan tertib," harapnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005